

ADAPTASI SOSIAL BUDAYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN: STUDI KASUS PERAN NEGARA MENDORONG UMKM LOKAL BERSAING DI PASAR GLOBAL MELALUI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. Pendahuluan

Sistem pemerintahan sebenarnya bukanlah mesin yang kaku dan tidak berubah, melainkan sebuah organisme hidup yang terus lahir, tumbuh, dan berkembang. Sistem ini juga berpotensi mati atau tergantikan oleh sistem lain (Kurniawan, 2021). Dalam disiplin ekologi pemerintahan, tata kelola negara dipandang sebagai sistem terbuka. Sistem ini secara proaktif dan berkelanjutan melakukan pertukaran energi, materi, dan informasi baik dengan lingkungan internal maupun eksternalnya (Yuningsih, 2026). Dinamika interaksi ekologis ini mengharuskan penyelenggara pemerintahan untuk selalu peka dan responsif terhadap perubahan lingkungan agar sistem dapat beroperasi dalam keseimbangan yang dinamis atau homeostasis (Wasistiono, 2013).

Salah satu elemen lingkungan eksternal yang paling berpengaruh terhadap sistem pemerintahan adalah aspek sosial budaya. Aspek ini merupakan salah satu pilar dari Panca Gatra (Syafiie, 2019). Pepatah "lain lubuk, lain ikannya" sangat penting bagi penyelenggara negara. Pepatah ini menekankan bahwa setiap daerah memiliki aturan, karakteristik, dan budaya masyarakat yang berbeda. Situasi tersebut menuntut birokrasi pemerintahan untuk menyesuaikan diri (Yuningsih, 2026). Di Indonesia, penerapan asas desentralisasi dan pembentukan pemerintahan daerah yang otonom adalah contoh nyata dari akomodasi ekologis terhadap keanekaragaman sosial budaya masyarakat yang terpisah oleh bentang geografis (Kurniawan, 2021). Jika pemerintah salah dalam memahami kondisi sosial budaya masyarakat yang dilayaninya, kebijakan publik yang diterapkan bisa memicu penolakan massal, bahkan menghancurkan keseimbangan ekologi pemerintahan itu sendiri (Kurniawan, 2021).

Di tengah turbulensi era globalisasi, kebutuhan untuk beradaptasi dengan sosial budaya menemukan relevansinya secara empiris melalui paradoks yang diajukan oleh John Naisbitt dalam Global Paradox. Paradoks tersebut adalah prinsip "think locally, act globally" dan "think globally, act locally." Untuk menghadapi tekanan ini, sistem pemerintahan harus bertransformasi menjadi lebih inovatif demi menggerakkan potensi budaya lokal agar mampu bersaing di tingkat global. Dorongan ini terlihat dalam peran dan dukungan negara untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mewakili budaya dan produksi lokal. Dengan harapan, mereka dapat berekspansi ke pasar

internasional. Dalam pendekatan sistem yang fungsional, dukungan negara ini bertujuan untuk memperbaiki komponen masukan dan proses, agar kapasitas sosial masyarakat dapat diproduksi menjadi komoditas lokal yang memiliki daya saing (Nafsi, Azizah, Fajriyanti, & Herabudin, 2021).

Bukti nyata dari intervensi ini dilakukan pemerintah melalui adaptasi teknologi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) atau e-Katalog. Berdasarkan kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2022, strategi negara ditargetkan melalui percepatan penayangan 1 juta produk UMKM ke dalam e-Katalog dan dukungan belanja pemerintah untuk produk lokal mencapai Rp400 triliun. Dalam rangka adaptasi birokrasi, pemerintah memangkas regulasi secara signifikan, dari 8 tahapan penayangan produk menjadi 2, serta menghapus sistem negosiasi harga yang rumit. Selain itu, untuk melindungi stabilitas sosial dan ekonomi subsistem di bawahnya, pemerintah membekukan lebih dari 13.600 produk impor yang sudah memiliki pengganti dari dalam negeri. Pemerintah juga mendorong setiap daerah untuk mengelola e-Katalog lokalnya sendiri. Langkah ini menunjukkan bahwa teknologi global tetap terintegrasi dengan konteks sosial budaya masing-masing daerah.

Digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa ini mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang menjamin transparansi, efektivitas, dan keadilan di masyarakat (Aridhayandi, 2018). Keberadaan e-Katalog yang transparan menjadi sangat penting, karena secara ekologis mampu mempersempit ruang gerak pengaruh entitas Pemerintahan Bayangan dalam struktur pemerintahan daerah (Syauket & Wijanarko, 2021). Dengan akses pengadaan yang setara secara digital, UMKM lokal dapat mandiri dan bersaing tanpa bergantung pada birokrasi patronase, jaringan kekerabatan, kasta, atau kelompok oligarki yang selama ini menguasai anggaran daerah (Kurniawan, 2021).

B. Fokus Makalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, makalah ini fokus pada pembahasan mengenai adaptasi sosial budaya dalam dinamika ekologi pemerintahan dan implementasi nyata peran negara secara fungsional di era globalisasi. Pembahasan ini berlandaskan pada prinsip adaptasi ekologis "lain lubuk, lain ikannya" serta konsep "think locally, act globally" dan "think globally, act locally". Tata kelola pemerintahan dituntut untuk mampu merespons tuntutan pasar global tanpa mengabaikan karakteristik dan kekuatan budaya lokal (Syafiie, 2019; Wasistiono, 2013).

Secara spesifik, penulisan makalah ini akan menguraikan dan menjawab dua rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana penjelasan dan keterkaitan antara kondisi lingkungan sosial budaya (Panca Gatra) masyarakat dengan sistem ekologi pemerintahan?
2. Bagaimana contoh kasus empiris mengenai peran fungsional penyelenggara pemerintahan dalam membangkitkan kekuatan budaya lokal (pemberdayaan UMKM) agar mampu bersaing di pasar global melalui inovasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah?

C. Pembahasan

1. Ekologi Pemerintahan dan Dimensi Sosial Budaya dalam Tata Kelola Negara

Dalam kajian ekologi pemerintahan, pemerintah dilihat sebagai sistem terbuka dan organisme hidup yang terus berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Hubungan ini memaksa penyelenggara pemerintahan untuk peka terhadap perubahan lingkungan agar dapat menjaga keseimbangan yang dinamis. Salah satu elemen lingkungan eksternal yang paling memengaruhi sistem pemerintahan adalah aspek sosial budaya, yang merupakan bagian dari konsepsi Panca Gatra.

Aspek sosial budaya berdampak besar pada kinerja pemerintahan. Karakter dan nilai-nilai masyarakat akan memengaruhi efektivitas suatu kebijakan. Pepatah "lain lubuk, lain ikannya" menggambarkan pentingnya adaptasi budaya. Penyelenggara negara perlu menyadari bahwa setiap daerah memiliki budaya dan karakteristik yang berbeda. Di era globalisasi, adaptasi ini sejalan dengan pandangan John Naisbitt dalam Global Paradox, yang menyatakan prinsip "think locally, act globally" dan "think globally, act locally". Sistem pemerintahan harus mampu merespons perubahan di pasar global tanpa melupakan akar budaya lokal. Salah satu bentuk nyata adaptasi ini adalah pentingnya negara untuk membangkitkan kekuatan ekonomi akar rumput, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Produk lokal yang bernilai budaya perlu tampil di kancah internasional tanpa kehilangan identitas aslinya.

2. Analisis Fungsional: Peran Negara Mengglobalkan UMKM melalui E-Procurement

Dilihat dari sisi fungsional, sistem tata kelola pemerintahan beroperasi melalui tahapan Masukan, Proses, Keluaran, hingga menghasilkan Nilai Guna dan Umpan Balik. Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada tahun 2022, yang mendorong UMKM lokal untuk masuk ke dalam e-Katalog, adalah contoh yang tepat untuk menjelaskan cara kerja sistem ekologi fungsional ini (catatan: data statistik LKPP diambil dari informasi eksternal):

- Masukan: Komponen input terdiri dari anggaran dan regulasi. Negara menyuntikkan input ke dalam sistem berupa komitmen belanja pemerintah sebesar Rp400 triliun yang harus menyerap produk UMKM lokal serta menyediakan infrastruktur digital berupa platform Toko Daring.
- Proses: Ini adalah aktivitas yang mengubah masukan menjadi keluaran. Sebagai bentuk wirausaha, pemerintah memperbaiki proses dengan mempersingkat birokrasi penayangan produk e-Katalog dari 8 tahapan menjadi hanya 2, serta menghapus kewajiban negosiasi harga yang sering menyulitkan pelaku usaha kecil.
- Keluaran dan Nilai Guna: Target tayangnya 1 juta produk UMKM di e-Katalog pada tahun 2022 adalah Output, sedangkan Outcome-nya adalah peningkatan kontribusi produk lokal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif.
- Adaptasi Lingkungan: Sistem pemerintahan harus mampu menjaga keberlangsungan terhadap perubahan lingkungan. Tindakan LKPP membekukan lebih dari 13.600 produk impor yang sudah memiliki pengganti dari dalam negeri adalah contoh intervensi negara untuk merespons ancaman lingkungan eksternal, yaitu serbuan produk asing, demi melindungi lingkungan internalnya yang mendukung stabilitas sosial-ekonomi UMKM lokal.

LKPP juga mendorong pemerintah daerah untuk mengelola e-Katalog lokal sebagai pengakuan terhadap "dimensi ruang", di mana subsistem pemerintah daerah diberdayakan oleh suprasistem pemerintah pusat untuk mengelola pasar sesuai karakteristik budayanya.

C. E-Procurement sebagai Instrumen Good Governance dan Reduksi Shadow State

Sistem pengadaan secara elektronik terbukti menjadi alat yang efektif untuk menekan praktik Pemerintah Bayangan. Shadow state adalah jaringan kekuasaan informal yang beroperasi di luar struktur formal namun memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi kebijakan dan mendistribusikan anggaran proyek demi keuntungan pribadi. Keberadaan shadow state ini sangat rentan terhadap praktik korupsi dan ketimpangan sosial ekonomi.

Dengan diterapkannya e-procurement, interaksi langsung dan monopoli informasi yang biasanya dieksploitasi oleh shadow state dapat dikurangi. Hal ini merupakan penerapan nyata dari pilar-pilar tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

- **Transparansi:** E-Katalog memastikan akses informasi terbuka bagi publik dan UMKM.
- **Akuntabilitas:** Jejak digital yang dapat dilacak menjamin bahwa pengadaan barang/jasa bisa dipertanggungjawabkan.
- **Kesetaraan:** Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh UMKM lokal untuk bersaing secara sehat tanpa bergantung pada koneksi informal, dinasti politik, atau suap kepada birokrat.

D. Faktor-Faktor Utama Ekologis dalam Pemberdayaan UMKM melalui E-Procurement

Berdasarkan tinjauan empiris, keberhasilan negara dalam mendorong UMKM lokal bersaing di pasar global melalui sistem e-procurement sangat ditentukan oleh lima faktor utama berikut (catatan: merujuk pada literatur eksternal yang diintegrasikan dalam kerangka ekologi pemerintahan):

- **Pengurangan Biaya Transaksi:** Implementasi e-procurement memperbaiki tahapan proses dalam birokrasi, sehingga menekan biaya, mempercepat siklus pengadaan, dan memberikan fleksibilitas bagi UMKM. (Standing et al., 2010; Thomson, 2006).
- **Dukungan Kebijakan Pemerintah:** Pemerintah sebagai suprasistem harus menyediakan masukan yang memadai berupa insentif finansial, infrastruktur, dan reformasi regulasi. Intervensi ini diperlukan agar UMKM bisa memenuhi standar global, termasuk kepatuhan terhadap regulasi tata kelola lingkungan yang baik.
- **Adaptasi Sosial Budaya:** Sistem digital tidak boleh terpisah dari budaya masyarakat. Penerapan e-government harus diselaraskan dengan karakteristik, kebiasaan, dan nilai-nilai masyarakat lokal agar tidak menghadapi penolakan.
- **Literasi Digital:** UMKM perlu dibekali kemampuan teknis untuk menggunakan platform elektronik. Negara perlu membantu kelemahan ini melalui pendampingan yang berkelanjutan.
- **Model Kolaboratif:** Keterlibatan tiga pilar Good Governance—pemerintah, platform digital, dan perguruan tinggi—adalah fondasi untuk sistem yang kuat. Sinergi ini memastikan pemberdayaan UMKM berlangsung secara inklusif dan terarah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah bukan hanya entitas birokrasi yang kaku; ia adalah organisme hidup dan sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungan. Dalam merespons tekanan globalisasi, sistem pemerintahan perlu mampu menyesuaikan diri dengan dimensi

Panca Gatra (sosial budaya) masyarakatnya, sejalan dengan prinsip Naisbitt "think globally, act locally" dan pepatah "lain lubuk, lain ikannya." Wujud nyata dari penyesuaian ini adalah kebutuhan sistem pemerintahan untuk berfungsi sebagai negara yang berjiwa wirausaha, guna membangkitkan kekuatan ekonomi akar rumput (UMKM) agar dapat bersaing di kancah internasional tanpa kehilangan identitas budaya lokal.

Jika ditinjau dari pendekatan sistem secara fungsional, penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) atau e-Katalog menjadi bentuk konkret dari perbaikan tahapan Masukan (Input) dan Proses (Process) negara. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan Keluaran (Output) berupa daya saing UMKM dan Nilai Guna (Outcome) yaitu pertumbuhan ekonomi inklusif. Kebijakan afirmasi pemerintah yang memangkas birokrasi e-Katalog dari 8 tahapan menjadi 2 tahapan, menghapus negosiasi harga yang rumit, dan mengalokasikan ratusan triliun anggaran untuk belanja produk lokal merupakan langkah perlindungan ekologis untuk menjaga subsistem internal agar tidak hancur oleh serangan produk impor dari luar.

Secara sosiologis dan politis, inovasi e-Procurement juga menjadi alat penting untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik agar bisa menghilangkan ancaman Pemerintah Bayangan. Digitalisasi pengadaan memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan terpenuhi. Ini secara efektif menutup ruang bagi oligarki, makelar proyek, dan jaringan dinasti politik yang sering mengeksploitasi sistem terkunci melalui jalur patronase, korupsi, dan kolusi.

Akhirnya, keberhasilan negara dalam mendorong UMKM ke pasar global melalui pengadaan elektronik sangat bergantung pada lima faktor pembentuk ekosistem: (1) pemangkasan biaya transaksi dalam siklus birokrasi, (2) dukungan penuh dari kebijakan dan anggaran pemerintah, (3) penyesuaian budaya agar inovasi digital tidak menimbulkan resistensi lokal, (4) peningkatan kapasitas literasi digital Sumber Daya Manusia (elemen Tri Gatra), serta (5) kolaborasi lintas sektor antara negara, swasta, dan masyarakat madani.

E. Daftar Referensi

1. Agustino, L. (2011). Sisi gelap otonomi daerah. Widya Padjadjaran.
2. Hasibuan, S. A. (2019). Peranan ekologi pemerintahan dalam meningkatkan daya saing kebijakan pemerintah daerah. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 2(1), 33-47. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.916>
3. Kurniawan, R. C. (2021). Ekologi pemerintahan. Literasi Nusantara Abadi.

4. Nafsi, N. D., Azizah, N., Fajriyanti, N., & Herabudin. (2021). Pemerintah sebagai sebuah sistem dalam kajian ekologi (Government as a system in ecological studies). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2479-2484.
5. Syafiie, I. K. (2019). *Ekologi pemerintahan di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
6. Syauket, A., & Wijanarko, D. (2021). Negara bayangan cenderung korupsi, sisi gelap otonomi daerah. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 3(1), 35-43.
7. Wasistiono, S. (2013). *Pengantar ekologi pemerintahan*. IPDN Press.
8. Yuningsih, N. Y. (2026). *Modul 1-5 ekologi pemerintahan*. Universitas Terbuka.
9. Thomson, J. D. (2006). Impact of e-innovation on corporate procurement control: Electronic marketplaces and broad spectrum changes. In *Entrepreneurship and innovations in e-business: An integrative perspective* (pp. 261–287). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-59140-920-5.ch014>
10. Standing, C., Stockdale, R., & Love, P. E. D. (2010). Managing the transition to global electronic markets in the resource engineering sector. *Journal of Enterprise Information Management*, 23(1), 56–80. <https://doi.org/10.1108/17410391011008905>
11. Standing, C., Sims, I., Stockdale, R., Gengatharen, D., Standing, S., & Wassenaar, A. (2004). Can e-marketplaces bridge the digital divide? An analysis of two Western Australian cases. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2004.tb00130.x>
12. Hashim, R., & Mazuki, M. A. (2012). Electronic procurement (e-procurement) implementation in municipalities: Lessons learned. In *E-procurement management for successful electronic government systems* (pp. 220–238). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-2119-0.ch014>
13. Alam, M. C., Setiawan, B., Toiba, H., Maulidah, S., & Rahman, M. S. (2025). Supply chain management practices of SMEs in developing countries: Bibliometric and systematic reviews. *Agricultural Economics (Czech Republic)*, 71(2), 99–112. <https://doi.org/10.17221/290/2024-AGRICECON>
14. Joo, H.-Y., & Suh, H. (2017). The effects of government support on corporate performance hedging against international environmental regulation. *Sustainability*, 9(11), Article 1980. <https://doi.org/10.3390/su9111980>
15. Joo, H.-Y., & Min, H. (2023). Assessing the impacts of government environmental policies on the small and medium-sized firm's performances in Korea and China. *Benchmarking*, 30(7), 2275–2302. <https://doi.org/10.1108/BIJ-12-2021-0754>
16. Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2010). Examining the role of the culture of local government on adoption and use of e-government services. In M. Janssen, W.

Lamersdorf, J. Pries-Heje, & M. Rosemann (Eds.), *IFIP Advances in Information and Communication Technology* (Vol. 334, pp. 79–93). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-15346-4_7

17. Doktoralina, C. M., Abdullah, M. A. F., Febrian, W. D., & Maulana, D. (2025). Empowering coastal SMEs: A digital transformation model to enhance competitiveness and sustainability. *Quality - Access to Success*, 26(206), 422–427. <https://doi.org/10.47750/QAS/26.206.41>
18. Tran, L.-D., Vu, X.-N., Pham, T.-T.-P., & Truong, T.-V.-P. (2026). Design and implementation of a digital business support system for local enterprises: From training to execution. In T. X. Tu, L. H. Son, P. T. Nghia, V. Thai, N. Van Nui, & N. T. Thuy (Eds.), *Lecture Notes in Networks and Systems* (Vol. 1833, pp. 430–438). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-18162-6_44
19. Sudario, M. E. (2025). Sustainability struggles: Challenges encountered by small and micro-entrepreneurs in rural Philippines. In *Studies in Systems, Decision and Control* (Vol. 608, pp. 697–706). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-96641-5_58
20. Puspitasari, N. B., Aditya, K. A., & Rosyada, Z. F. (2025). Key factors influencing the use of electronic procurement catalog for SMEs in Indonesia through the UMEGA model. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(7), Article e2025337. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025337>
21. Yan, J., & Ahmad, F. (2025). Bridging institutional voids in a volatile emerging economy: Role of regulatory cultural stewardship as a dynamic capability for sustainable AI-enabled digital transformation in SMEs. *Sustainability*, 17(22), Article 10397. <https://doi.org/10.3390/su172210397>
22. Shabbir, M. S. (2026). Artificial intelligence and entrepreneurial ecosystems in emerging economies: Rethinking innovation, governance and SME development. *Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1177/23939575261443024>